

Menakar Daulat Rakyat dan Daulat Tuanku: Analisis Komparatif Sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan Monarki Konstitusional Malaysia

Mukhammad Rifqy Fillah
Universitas Yudharta Pasuruan
E-mail: rifemoe@gmail.com

Abstract

The governmental system of a state is inseparable from the concept of sovereignty as the primary source of political legitimacy. Indonesia and Malaysia are two Southeast Asian countries with relatively similar historical and cultural backgrounds, yet they adopt different systems of government. Indonesia applies a republican system grounded in the principle of popular sovereignty, while Malaysia implements a constitutional monarchy characterized by the concept of *daulat Tuanku*. These conceptual differences have significant implications for the organization of government and the practice of public administration in each country. This study aims to analyze and compare the governmental systems of the Republic of Indonesia and the constitutional monarchy of Malaysia by focusing on the concept of sovereignty and its implications for public administration. This research employs a qualitative approach using literature review and comparative analysis of constitutional documents, statutory regulations, and relevant scholarly works. The findings indicate that the principle of popular sovereignty in Indonesia positions the people as the primary source of state authority, which is reflected in democratic mechanisms and bureaucratic accountability. Meanwhile, the concept of *daulat Tuanku* in Malaysia places the monarch as a symbol of state sovereignty within a constitutional framework, contributing to political stability and continuity of governance. These differences influence the characteristics of public administration, particularly in terms of legitimacy, bureaucratic structure, and governance practices. This study finds that differences in the concept of sovereignty between Indonesia and Malaysia shape distinct patterns of governmental organization and public administration. The principle of popular sovereignty in Indonesia necessitates robust democratic mechanisms and high levels of bureaucratic accountability, whereas the concept of *daulat Tuanku* in Malaysia supports political stability through the constitutional and symbolic role of the monarch. Accordingly, efforts to strengthen governance in both countries should be grounded in public administration policies that reflect the institutional characteristics of their respective governmental systems and adhere to principles of effective and sustainable governance.

Keywords: *Measuring, Sovereignty, Comparative, Indonesia, Malaysia*

Abstrak

Sistem pemerintahan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari konsep kedaulatan yang menjadi sumber legitimasi kekuasaan. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang relatif serumpun, namun menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Indonesia menganut sistem republik dengan prinsip daulat rakyat, sedangkan Malaysia menerapkan sistem monarki konstitusional yang dikenal dengan konsep daulat Tuanku. Perbedaan konseptual tersebut berimplikasi pada pola penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi publik di masing-masing negara. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem pemerintahan Republik Indonesia dan Monarki Konstitusional Malaysia dengan menitikberatkan pada konsep kedaulatan serta implikasinya terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis komparatif terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep daulat rakyat di Indonesia menempatkan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan negara yang tercermin dalam mekanisme demokrasi dan akuntabilitas birokrasi. Sementara itu, konsep daulat Tuanku di Malaysia menempatkan raja sebagai simbol kedaulatan negara dalam kerangka konstitusional, yang berkontribusi terhadap stabilitas politik dan kontinuitas pemerintahan. Perbedaan tersebut memengaruhi karakteristik administrasi publik, khususnya dalam hal legitimasi kekuasaan, pola birokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Studi ini menyimpulkan bahwa perbedaan konsep kedaulatan antara Indonesia dan Malaysia berpengaruh signifikan terhadap pola penyelenggaraan sistem pemerintahan dan administrasi publik. Penerapan prinsip daulat rakyat di Indonesia menuntut mekanisme demokrasi dan akuntabilitas birokrasi yang kuat, sementara konsep daulat Tuanku di Malaysia berkontribusi pada stabilitas politik melalui peran simbolik raja dalam kerangka monarki konstitusional. Penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia dan Malaysia memerlukan penyesuaian kebijakan administrasi publik yang selaras dengan karakter sistem pemerintahan masing-masing, dengan mengacu pada praktik tata kelola yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Menakar, Daulat, Komparatif, Indonesia, Malaysia

Pendahuluan

Konsep kedaulatan merupakan fondasi utama dalam pembentukan dan penyelenggaraan sistem pemerintahan suatu negara. Kedaulatan tidak hanya menentukan sumber legitimasi kekuasaan, tetapi juga memengaruhi bagaimana pemerintahan dijalankan, termasuk pola hubungan antara negara dan warga negara serta mekanisme administrasi publik yang diterapkan. Dalam konteks negara modern, kedaulatan menjadi landasan normatif bagi penyusunan kebijakan publik dan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. (Budiardjo, 2003). Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kedekatan historis dan kultural, namun mengadopsi sistem pemerintahan yang berbeda. Indonesia menganut sistem republik dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menempatkan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan negara, yang diwujudkan melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum, dan akuntabilitas pemerintahan. (Hakim, 2023)

Sebaliknya, Malaysia menerapkan sistem monarki konstitusional, di mana kedaulatan negara secara simbolik dilekatkan pada raja atau Yang di-Pertuan Agong dalam kerangka konstitusi federal (Asshiddiqie, 2006). Perbedaan konsep kedaulatan tersebut berimplikasi langsung terhadap struktur dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem republik Indonesia, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih melalui mekanisme demokratis, sehingga legitimasi kekuasaan sangat bergantung pada kehendak rakyat. Sementara itu, dalam sistem monarki konstitusional Malaysia, raja berperan sebagai simbol persatuan dan kesinambungan negara, sedangkan kekuasaan eksekutif sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri dan kabinet berdasarkan sistem parlementer (Harding, 2022). Dari perspektif Administrasi Publik, sistem pemerintahan dan konsep kedaulatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap karakter birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Prinsip kedaulatan rakyat

menuntut birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan publik. Sebaliknya, sistem monarki konstitusional cenderung menekankan stabilitas pemerintahan dan kontinuitas administrasi melalui struktur kelembagaan yang relatif mapan. (Putra, 2022)

Oleh karena itu, perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia menghasilkan dinamika administrasi publik yang tidak sepenuhnya serupa, meskipun keduanya sama-sama mengadopsi prinsip *good governance*. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas sistem pemerintahan Indonesia maupun Malaysia secara terpisah. Namun, kajian yang secara khusus membandingkan kedua negara dengan menitikberatkan pada konsep kedaulatan dan implikasinya terhadap administrasi publik masih relatif terbatas. Kebanyakan studi komparatif lebih berfokus pada aspek hukum tata negara atau politik, tanpa menggali secara mendalam dampaknya terhadap penyelenggaraan administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi melalui pendekatan komparatif lintas negara. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem pemerintahan Republik Indonesia dan Monarki Konstitusional Malaysia dengan menyoroti konsep *daulat rakyat* dan *daulat Tuanku*, serta implikasinya terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi Administrasi Publik, sekaligus memberikan perspektif praktis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. (Nurdin, 2011)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis komparatif, yang dipilih karena orientasi kajian tidak diarahkan pada pengukuran hubungan sebab-akibat maupun pengujian hipotesis secara kuantitatif. Sebaliknya, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam perbedaan konseptual dan institusional dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan Malaysia sebagai negara monarki konstitusional. Pemahaman tersebut difokuskan pada konsep kedaulatan yang dianut oleh masing-masing negara serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam praktik ketatanegaraan dan administrasi publik. Secara metodologis, penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis karakteristik sistem pemerintahan kedua negara sekaligus menganalisis makna dan konsekuensi dari karakteristik tersebut. Analisis dilakukan melalui perbandingan berbagai aspek fundamental, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan yang dianut, kedudukan dan peran kepala negara, serta mekanisme legitimasi kekuasaan. (Hasanah & Sukmawan, 2021)

Dengan menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan baik secara struktural maupun konseptual antara sistem pemerintahan Republik Indonesia dan Malaysia. Objek penelitian ini adalah sistem pemerintahan di Indonesia dan Malaysia, dengan fokus kajian yang diarahkan pada tiga aspek utama. Pertama, konsep kedaulatan yang menjadi landasan normatif dan filosofis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, kedudukan serta peran kepala negara dalam struktur ketatanegaraan masing-masing negara. Ketiga, implikasi sistem pemerintahan terhadap stabilitas politik dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Fokus tersebut dipilih karena dinilai mampu menjelaskan perbedaan mendasar antara prinsip kedaulatan rakyat (*daulat rakyat*) yang dianut oleh Indonesia dan prinsip kedaulatan Raja (*daulat Tuanku*) dalam sistem monarki konstitusional Malaysia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh melalui studi kepustakaan.(Fitriyani et al., 2024)

Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, seperti buku teks akademik, artikel jurnal ilmiah, dokumen konstitusional, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan administrasi publik di Indonesia dan Malaysia. Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang diperlukan untuk menganalisis objek penelitian secara komprehensif dan mendalam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif-komparatif. Proses analisis dimulai dengan pengelompokan data berdasarkan tema-tema penelitian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilakukan penafsiran terhadap konsep kedaulatan, struktur ketatanegaraan, dan mekanisme pemerintahan masing-masing negara. Tahap berikutnya adalah membandingkan variabel-variabel utama tersebut untuk menemukan pola persamaan dan perbedaan. Hasil analisis kemudian disintesis guna menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai karakteristik sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks politik dan administrasi publik.(Herman et al., 2022)

Hasil Dan Pembahasan

A. Kedaulatan dan Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Teoretis

Dalam kajian politik dan administrasi publik, kedaulatan dipahami sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Teori klasik mengenai kedaulatan menekankan pentingnya supremasi konstitusi sebagai pembatas kekuasaan, sehingga pelaksanaan kedaulatan harus berjalan dalam kerangka hukum yang mengikat seluruh penyelenggara negara. Dalam konteks ini, kedaulatan tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai dasar pengorganisasian kekuasaan negara (Dicey, 1915). Pendekatan komparatif terhadap sistem pemerintahan menunjukkan bahwa bentuk kedaulatan memengaruhi pola hubungan antara lembaga negara dan mekanisme pengambilan keputusan. Variasi sistem pemerintahan menghasilkan perbedaan dalam stabilitas politik, akuntabilitas pemerintahan, dan efektivitas kebijakan publik (Lijphart, 1999). Legitimasi kekuasaan dalam sistem pemerintahan modern tidak hanya ditentukan oleh mekanisme hukum, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam sistem republik, legitimasi diperoleh melalui proses demokratis yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan.

Sebaliknya, dalam sistem monarki konstitusional, legitimasi kekuasaan dibangun melalui kombinasi antara tradisi monarki dan pembatasan konstitusional yang menjamin stabilitas pemerintahan (Bogdanor, 1995). Perbedaan sumber legitimasi tersebut memengaruhi cara pemerintahan dijalankan serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan menjadi variabel penting dalam memahami perbedaan sistem pemerintahan lintas negara. Monarki konstitusional dipahami sebagai sistem pemerintahan yang mempertahankan institusi monarki dalam kerangka demokrasi konstitusional. Raja berfungsi sebagai simbol negara dan pemersatu bangsa, sementara kekuasaan politik dijalankan oleh pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Sistem ini sering dikaitkan dengan tingkat stabilitas politik yang relatif tinggi karena adanya pemisahan yang jelas antara simbol kedaulatan dan pelaksanaan kekuasaan administratif (Hazell & Morris, 2020). Dalam konteks negara-negara Persemakmuran dan Asia, monarki konstitusional menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap

demokrasi modern tanpa menghilangkan peran simbolik monarki. Hal ini menjadikan sistem monarki konstitusional relevan untuk dikaji dalam studi perbandingan sistem pemerintahan.

Kajian administrasi publik menempatkan sistem pemerintahan sebagai faktor struktural yang memengaruhi kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan administrasi publik komparatif digunakan untuk memahami bagaimana perbedaan sistem pemerintahan membentuk pola birokrasi, pengambilan kebijakan, dan pelayanan publik di berbagai negara (Jreisat, 2019). Studi komparatif juga memungkinkan identifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengabaikan konteks kelembagaan masing-masing negara. Dengan demikian, perbandingan sistem pemerintahan tidak bertujuan untuk menyeragamkan model, melainkan untuk memahami variasi institusional dan implikasinya terhadap administrasi publik (Pollitt & Bouckaert, 2017). Sejumlah penelitian telah membahas sistem pemerintahan republik dan monarki konstitusional secara terpisah. Namun, kajian yang menghubungkan konsep kedaulatan dengan praktik administrasi publik dalam studi komparatif lintas negara masih relatif terbatas. Khususnya dalam konteks Indonesia dan Malaysia, penelitian yang mengaitkan *daulat rakyat* dan *daulat Tuanku* dengan implikasi administrasi publik belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menyajikan analisis komparatif yang menitikberatkan pada hubungan antara konsep kedaulatan dan penyelenggaraan administrasi publik

B. Operasionalisasi Daulat Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip daulat rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai norma konstitusional, tetapi juga menjadi kerangka operasional dalam penyelenggaraan administrasi publik. Kedaulatan rakyat dimanifestasikan melalui mekanisme representasi politik dan sistem pertanggungjawaban pemerintahan, yang menempatkan birokrasi sebagai perpanjangan tangan kehendak publik. Dalam konteks ini, legitimasi birokrasi tidak bersifat inheren, melainkan diperoleh melalui kinerja dan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas. Analisis menunjukkan bahwa model ini mendorong terbentuknya birokrasi yang secara normatif terbuka terhadap pengawasan publik dan evaluasi kinerja. Namun, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa tingginya intensitas kompetisi politik dalam sistem republik berdampak pada fluktuasi arah kebijakan dan prioritas administratif. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan konsistensi implementasi kebijakan publik dan memengaruhi efektivitas administrasi dalam jangka menengah. Dengan demikian, prinsip daulat rakyat di Indonesia menciptakan relasi yang dinamis antara aktor politik, birokrasi, dan masyarakat, di mana legitimasi administratif terus dinegosiasikan melalui proses demokratis. (Mia Amalia, 2016)

Berbeda dengan Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep daulat Tuanku dalam sistem monarki konstitusional Malaysia berfungsi sebagai jangkar legitimasi negara yang relatif stabil. Kedudukan raja sebagai simbol kedaulatan negara memberikan fondasi normatif yang tidak terikat langsung pada dinamika politik elektoral. Dalam praktik administrasi publik, hal ini tercermin pada struktur birokrasi yang cenderung lebih konsisten dan terlembaga. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemisahan antara simbol kedaulatan dan pelaksana kekuasaan eksekutif memungkinkan birokrasi Malaysia beroperasi dengan tingkat stabilitas kelembagaan yang tinggi. Pergantian pemerintahan tidak secara signifikan mengubah orientasi dasar

administrasi publik, sehingga kesinambungan kebijakan relatif terjaga. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa stabilitas tersebut disertai dengan ruang partisipasi publik yang lebih terbatas dibandingkan sistem republik. Dengan demikian, daulat Tuanku berperan tidak hanya sebagai simbol konstitusional, tetapi juga sebagai faktor struktural yang memengaruhi pola hubungan antara politik dan administrasi. (Iswardhana, 2023)

Hasil komparasi menunjukkan bahwa perbedaan utama antara Indonesia dan Malaysia terletak pada pola legitimasi kekuasaan dan implikasinya terhadap birokrasi publik. Di Indonesia, legitimasi birokrasi bersifat performatif, yaitu bergantung pada kemampuan aparaturnya dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas dan pelayanan publik. Sebaliknya, di Malaysia, legitimasi birokrasi lebih bersifat struktural, karena didukung oleh simbol kedaulatan yang relatif stabil. Perbedaan tersebut menghasilkan karakter birokrasi yang berbeda. Birokrasi Indonesia cenderung adaptif dan responsif terhadap tuntutan publik, namun rentan terhadap tekanan politik jangka pendek. Sementara itu, birokrasi Malaysia menunjukkan tingkat stabilitas dan kepatuhan prosedural yang tinggi, meskipun dengan tingkat fleksibilitas dan partisipasi publik yang lebih terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat model tunggal yang sepenuhnya superior. Efektivitas administrasi publik sangat bergantung pada kesesuaian antara konsep kedaulatan, struktur pemerintahan, dan kapasitas kelembagaan. (Jurnal et al., 2023)

C. Implikasi Konseptual terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Hasil penelitian menegaskan bahwa konsep kedaulatan berfungsi sebagai variabel penentu dalam pembentukan tata kelola pemerintahan. Di Indonesia, penguatan tata kelola memerlukan upaya menstabilkan hubungan antara politik dan administrasi agar prinsip daulat rakyat tidak mengorbankan efektivitas birokrasi. Di Malaysia, tantangan utama terletak pada upaya memperluas ruang akuntabilitas publik tanpa mengganggu stabilitas kelembagaan yang telah terbentuk. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia membentuk dua model administrasi publik yang berbeda secara struktural maupun fungsional, yang masing-masing memiliki implikasi tersendiri bagi praktik tata kelola pemerintahan. Temuan menunjukkan bahwa perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia tidak semata-mata bersifat kelembagaan, melainkan juga mencerminkan perbedaan filosofis dalam memaknai kedaulatan. (Rinaldi & Wijaya, 2025)

Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama melalui sistem republik presidensial, sedangkan Malaysia memadukan prinsip demokrasi elektoral dengan legitimasi simbolik monarki konstitusional. Perbedaan ini berimplikasi pada pola relasi eksekutif–legislatif, di mana Indonesia menegaskan pemisahan kekuasaan, sementara Malaysia menekankan keterikatan pemerintah pada dukungan parlemen. Implikasinya, Indonesia dapat memetik pembelajaran dari fleksibilitas sistem parlementer Malaysia dalam menjaga akuntabilitas politik dan stabilitas pemerintahan, sedangkan Malaysia dapat merefleksikan kepastian masa jabatan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia. Namun, adopsi praktik lintas sistem menghadapi keterbatasan konstitusional, dinamika politik, serta perbedaan budaya kelembagaan yang melekat pada masing-masing negara. (Satria & Chahnia, 2024)

Kesimpulan

Kajian komparatif ini menyimpulkan bahwa perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia mencerminkan pilihan konstitusional dan dinamika historis yang berbeda dalam

memaknai kedaulatan dan legitimasi kekuasaan negara. Indonesia menegaskan kedaulatan rakyat melalui sistem republik presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sementara Malaysia mengadopsi monarki konstitusional yang memadukan prinsip demokrasi elektoral dengan legitimasi simbolik institusi monarki. Perbedaan tersebut berimplikasi pada struktur kelembagaan negara serta pola hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari konteks konstitusional dan budaya politik masing-masing negara. Oleh karena itu, pembelajaran lintas sistem antara Indonesia dan Malaysia perlu dilakukan secara selektif dan adaptif, dengan mempertimbangkan batasan institusional serta karakter politik nasional, sehingga dapat memperkaya praktik tata kelola pemerintahan tanpa mengabaikan prinsip dasar sistem pemerintahan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*.
- Bogdanor, V. (1995). *The monarchy and the constitution*. Oxford University Press.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Dicey, A. V. (1915). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution 8th Ed*. Macmillan.
- Fitriyani, A., Rosadi, A. D., Laila, F., Puspita, D., & Imron, A. (2024). Determinan Persepsi Perilaku Generasi Milenial Dengan Generasi Z Mempengaruhi Keputusan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Journal of Education Science (JES)*, 10(April). <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jes/article/view/3695/1839>
- Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 280. <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/7745/4804>
- Harding, A. (2022). *The constitution of Malaysia*. Bloomsbury Publishing.
- Hasanah, H., & Sukmawan, S. (2021). Berbingkai Kemajemukan Budaya, Bersukma Desakalapatra: Selidik Etnografi atas Tradisi Tengger. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 4(1), 79–90. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i1.102>
- Hazell, R., & Morris, B. (2020). *The role of monarchy in modern democracy: European monarchies compared*. Bloomsbury Publishing.
- Herman, S., Sunuwati, Badruzzaman, & Ibrahim, A. (2022). Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare). *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 51–68. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/article/view/3181/1093
- Iswardhana, M. R. (2023). Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1080–1090. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5180>
- Jreisat, J. E. (2019). *Comparative public administration and policy*. Routledge.
- Jurnal, E., Hukum, I., Awaluddin, S., Gani, E. S., Sisni, S., Rusman, L., & Tubaka, M. R. (2023). Kejahatan Online Marketplace dalam Kriminologi dan Pengembangan Hukum Pidana Indonesia Institut Agama Islam Negeri Ambon , Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1799/2136>
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Mia Amalia. (2016). Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Di Hubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 2 no 2, 863.

- Nuridin. (2011). Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat. *Media Syari'ah*, Vol. XIII(1), 121–130.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis-into the age of austerity*. Oxford university press.
- Putra, M. M. Q. A. R. (2022). Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia. 7787.
- Rinaldi, F. A., & Wijaya, B. K. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan : Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah. 2(2), 3437–3447. <https://teewanjournal.com/index.php/peng/article/view/1508>
- Satria, N., & Chahnia, J. (2024). Integrasi Prinsip Syura dan Demokrasi : Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah dalam Hukum Islam dan Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14(2), 19. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/654-1541-1-SM (1).pdf
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Federal Constitution of Malaysia.